



Prabowo Terima PM Thailand, Kunjungan Perdana dalam 15 Tahun

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026) sore. Anutin merupakan PM Thailand pertama yang mengunjungi Indonesia sejak 15 tahun terakhir. Indonesia menargetkan total perdagangan Indonesia-Thailand menembus US\$20 miliar pada 2030. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan kedua negara mencapai US\$17,67 miliar pada 2025. Baca berita lengkap Hal.2. (ist.antara)

BERATNYA BEROBAT DI INDONESIA

BPJS Terancam Gagal Bayar, Biaya RS Mahal

Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Berdasarkan paparan BPJS Kesehatan pada Senin (3/8/2026), lembaga itu mencatat defisit operasional sekitar Rp2 triliun per bulan, dengan rasio klaim mencapai 108,72 persen. Disebut pula sekitar 54 juta peserta berstatus nonaktif akibat menunggak iuran. Tanpa realisasi dukungan pendanaan pemerintah sebesar Rp20 triliun, lembaga tersebut berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027. Sayangnya hingga kini, tanda-tanda 'uluran tangan' itu belum tampak. Gencetan lain datang dari mahalnya biaya rumah sakit (RS). Laporan Health Trends 2026 yang dirilis Mercer Marsh Benefits memperkirakan inflasi medis di Indonesia mencapai 17,8 persen sepanjang 2026, jauh melampaui inflasi umum nasional. Strategi untuk mengatasi masalah itu belum diumumkan pemerintah secara pasti. BPJS Kesehatan mengaku tengah mengkaji kemungkinan menjadikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif sebagai syarat dalam berbagai layanan publik. Mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, hingga keberangkatan haji dan umrah. Wacana itu juga dipertimbangkan untuk diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru. Mampukah langkah itu menjadi 'jurus sakti'? BACA SELENGKAPNYA DI HAL 11....

PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI MEDIS DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

**2024**

- 15,9%
- Sekitar 2,5%

**2026**

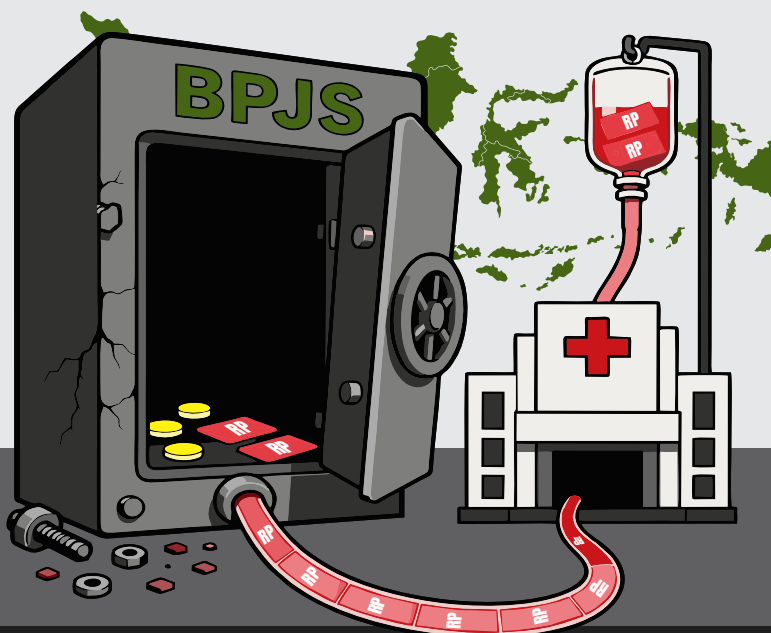
- 17,8%
- 2,5%

**2025**

- 17,9%
- Sekitar 2,5%

KET

- Inflasi Medis (Proyeksi/Catatan)
- Inflasi Umum



Transaksi layanan kesehatan
2 juta transaksi per hari



Pembayaran klaim
Rp 500 miliar per hari



Total pembayaran klaim:
Rp16,5 triliun per bulan



Iuran yang masuk
Rp 14 triliun per bulan

Kondisi
Keuangan
BPJS Kesehatan
Saat Ini

Defisit bulanan
Rp2 triliun

NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA - THAILAND DARI
TAHUN KE TAHUN

Tahun 2023

- Ekspor Indonesia: US\$ 7,22 miliar
- Impor Indonesia: US\$ 10,30 miliar
- Neraca Dagang: Defisit US\$ 3,08 miliar
- Total Perdagangan: US\$ 17,52 miliar

Tahun 2024

- Ekspor Indonesia: US\$ 7,70 miliar
- Impor Indonesia: US\$ 9,57 miliar
- Neraca Dagang: Defisit US\$ 1,87 miliar
- Total Perdagangan: US\$ 17,41 miliar

Tahun 2025

- Total perdagangan: US\$17,67 miliar
- Ekspor RI ke Thailand: US\$7,72 miliar
- Neraca perdagangan masih defisit dan fluktuatif

Tahun 2026

- Peluncuran Roadmap Kemitraan Strategis RI-Thailand 2026-2030
- Aktivasi Joint Trade Commission (JTC) tingkat Menteri Perdagangan
- Fokus: pangan, pupuk urea, ekonomi digital, energi, dan industri halal

Target 2030

- Nilai perdagangan bilateral ditargetkan mencapai US\$20 miliar

Prabowo Bidik Perdagangan RI-Thailand US\$20 Miliar BANGKOK TAWARKAN BERAS HINGGA DAGING DITUKAR PUPUK INDONESIA

Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Senin (3/8/2026), tidak hanya menandai kunjungan resmi pertama pemimpin Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Di balik seremoni kenegaraan itu, kedua negara mulai menyusun peta jalan baru untuk memperluas kerja sama ekonomi, pertahanan, hingga ketahanan pangan.



Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).ist

Salah satu usulan paling menonjol datang dari Anutin. Di hadapan Prabowo, ia menawarkan Thailand sebagai pemasok berbagai komoditas pangan bagi Indonesia, mulai dari beras, produk susu, hingga daging. Sebagai timbal balik, Bangkok berharap Indonesia meningkatkan ekspor pupuk urea ke Negeri Gajah Putih.

"Saya berharap dukungan Anda untuk meningkatkan impor produk pertanian Thailand, termasuk beras berkualitas tinggi, daging, produk susu, serta mesin pertanian," kata Anutin dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai gantinya, Thailand ingin meningkatkan pembelian pupuk urea dari Indonesia. Selama ini impor pupuk urea Thailand dari Indonesia berkisar 60 ribu ton per tahun. Menurut Anutin, angka itu dapat ditingkatkan hingga mencapai ratusan ribu ton setiap tahun.

Usulan tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih besar untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara. Anutin menyebut Indonesia kini merupakan mitra dagang terbesar keempat Thailand di kawasan ASEAN. Namun, menurutnya, posisi tersebut belum mencerminkan besarnya potensi ekonomi kedua negara.

"Melihat besarnya perekonomian kedua negara, kita seharusnya mampu meningkatkan volume perdagangan

yang saat ini sekitar 20 miliar dolar AS," ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga memasang target ambisius. Presiden Prabowo menargetkan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Thailand mencapai US\$20 miliar pada 2030 melalui implementasi roadmap kemitraan strategis kedua negara.

"Kami optimistis target perdagangan sebesar US\$20 miliar pada 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis," ujar Prabowo.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai perdagangan Indonesia-Thailand pada 2025 mencapai sekitar US\$17,67 miliar. Artinya, target yang dipasang pemerintah bukan lonjakan drastis, melainkan peningkatan bertahap melalui perluasan perdagangan dan investasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kedua negara sepakat mengaktifkan Joint Trade Committee (JTC) atau Komite Perdagangan Bersama. Forum ini akan mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha kedua negara untuk menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan sekaligus membuka peluang investasi baru.

Prabowo mengatakan kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama

hubungan Indonesia dan Thailand. Selain perdagangan barang, kedua negara juga ingin memperluas akses pasar dan meningkatkan investasi lintas sektor.

Bahas Latihan Militer

Kerja sama yang dibahas dalam pertemuan bilateral tidak berhenti pada urusan perdagangan pangan.

Prabowo mengusulkan peningkatan kerja sama pertahanan melalui penambahan frekuensi latihan militer bersama serta perluasan program pertukaran perwira untuk pendidikan dan pelatihan.

"Kita harus memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan. Kita juga perlu meningkatkan jumlah dan tingkat latihan bersama antara angkatan bersenjata kedua negara, serta memperbanyak pertukaran perwira dalam pendidikan dan pelatihan," kata Prabowo.

Selain itu, kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi di sektor investasi, ketahanan energi, teknologi digital, hingga konektivitas antarmasyarakat. Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Thailand yang telah berlangsung puluhan tahun perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara

sekalius memperkuat posisi ASEAN.

Ia juga menilai perkembangan teknologi digital menjadi salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena akan menentukan daya saing kawasan pada masa mendatang.

Kunjungan Anutin memiliki arti diplomatik tersendiri. Ini merupakan kunjungan resmi pertama seorang Perdana Menteri Thailand ke Indonesia dalam kurun waktu sekitar 15 tahun.

Selain menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo, Anutin dijadwalkan membuka Forum Bisnis Thailand-Indonesia serta menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN mengenai visi Thailand terhadap masa depan ASEAN, termasuk persiapan negara itu memegang keketuaan ASEAN pada 2028.

Bagi Indonesia, momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperluas hubungan dengan salah satu mitra dagang terbesarnya di Asia Tenggara. Sementara bagi Thailand, kerja sama pangan dan perdagangan dinilai menjadi pintu masuk untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang selama ini belum mencapai potensi maksimal.(wid,rls,ant/dya)

MPR TEMUI PRABOWO BAHAS PPHN, PRESIDEN SOROTI MAHALNYA PILKADA

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026), untuk menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dalam pertemuan itu, Prabowo menyambut baik gagasan tersebut sekaligus menyoroti mahalannya proses demokrasi di tingkat daerah yang dinilainya perlu menjadi bahan evaluasi.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan konsep PPHN yang sebelumnya masih berupa draf kini telah diserahkan kepada Presiden untuk didiskusikan. Menurut dia, PPHN dirancang sebagai pedoman pembangunan nasional yang berlaku lintas pemerintahan, bukan hanya untuk satu periode kepemimpinan.

"Kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani usai pertemuan.

Muzani menjelaskan, pada prinsipnya Prabowo menyerahkan kepada mekanisme di MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Menurut Presiden, arah pembangunan jangka panjang perlu menjadi acuan bagi pemerintahan berikutnya agar kebijakan strategis tetap berkesinambungan.

"Oleh karena itu, Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya," ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu yang disorot ialah tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah.

"Presiden menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Muzani.

Menurut dia, Prabowo menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme demokrasi saat ini berlangsung dengan biaya yang sangat besar.

"Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan," ujar Muzani.

Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi setelah terpilih melalui proses politik.

"Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian



Ketua MPR, Ahmad Muzani, mendampingi
Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (3/8/2026).ist

terjebak dalam tindak pidana korupsi," kata Muzani.

Menurutnya, persoalan tingginya biaya politik dan maraknya kasus korupsi kepala daerah menjadi isu yang perlu dipikirkan bersama dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Namun, Muzani tidak menjelaskan apakah perhatian Presiden tersebut akan bermuara pada usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, persoalan korupsi kepala daerah menjadi salah satu perhatian Presiden ketika membahas konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bersama pimpinan MPR.

"Beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, itu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," kata Muzani usai pertemuan.

Menurut Muzani, keprihatinan Presiden tidak terlepas dari proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai memerlukan biaya besar. Dalam pembahasan tersebut, Prabowo juga menaruh perhatian terhadap proses demokratisasi di daerah.

"Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan

daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan," ujar Muzani.

Seluruh Presiden dan Ketum Parpol Diundang

Selain menyerahkan konsep PPHN, pimpinan MPR juga mengundang Prabowo menghadiri Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Dikatakan seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu, serta para ketua umum partai politik diundang untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR 2026. Agenda tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, undangan akan disampaikan kepada seluruh mantan kepala negara dan wakil kepala negara tanpa terkecuali. Selain itu, para pimpinan partai politik juga dijadwalkan hadir dalam sidang tahunan tersebut.

"Semua presiden dan wakil presiden terdahulu kami undang. Termasuk ketua umum partai politik kami undang," kata Muzani.

Kehadiran para mantan presiden dalam Sidang Tahunan MPR selama ini kerap menjadi perhatian publik karena dianggap mencerminkan dinamika hubungan politik antarelite nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, forum tersebut belum pernah dihadiri secara lengkap oleh seluruh presiden purna tugas.

Pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri tercatat tidak pernah menghadiri Sidang Tahunan MPR.

GAJI BUPATI VS ONGKOS POLITIK

Penghasilan Resmi Bupati (Per Bulan)

- Gaji Pokok: Rp2.100.000
- Tunjangan Jabatan: Rp3.025.000
- Tunjangan Istri: Rp210.000
- Tunjangan Anak: Rp168.000
- Tunjangan Beras: Rp217.260

Penghasilan selama 5 tahun masa jabatan:

- ± Rp343 JUTA
(Belum termasuk fasilitas dinas)

Perkiraan Ongkos Politik PILKADA (Berdasarkan Berbagai Sumber)

Mulai dari Rp20 MILIAR hingga lebih dari Rp200 MILIAR

Komponen Biaya yang Umum Terjadi:

- Survei & Pemetaan Politik
- Konsolidasi Partai & Relawan
- Kampanye & Iklan (media cetak, elektronik, digital)
- Pertemuan Terbatas, Kunjungan, & Logistik
- Politik Uang/ Vote Buying (yang melanggar hukum)
- Biaya Lain-lain

Data & Perdebatan Sistem PILKADA

Fakta yang Perlu Kita Lihat

- 544 KASUS Korupsi Kepala Daerah (2004-2024)**
(Melibatkan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Kepala Daerah)
- Bupati: 384 kasus
- Wali Kota: 100 kasus
- Gubernur: 35 kasus
- Lainnya: 25 kasus

*Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch), Mei 2024

Sebaliknya, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), giliran SBY yang hampir selalu absen secara langsung. SBY hanya sekali mengikuti Sidang Tahunan MPR, yakni pada 2020, itu pun secara virtual.

Sementara itu, Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 setelah hubungan politiknya dengan Jokowi merenggang pasca-Pemilu. Adapun pada Sidang Tahunan MPR 2025, SBY dan Jokowi hadir bersamaan, sedangkan Megawati kembali tidak datang dengan alasan kondisi kesehatan.

Sebelumnya, pimpinan MPR bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8), untuk menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sekaligus mengundang Presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. (wid rls,kum,ant/dya)

Inovasi KOLEGA DKP Jatim, Mengubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan dan Penghasilan



SURABAYA — Pekarangan rumah yang selama ini hanya menjadi ruang kosong ternyata dapat menjadi sumber pangan sekaligus penghasilan keluarga. Gagasan sederhana itulah yang melandasi lahirnya program KOLEGA (Kolam Lele Keluarga), inovasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya ikan lele skala rumah tangga.

Melalui program ini, masyarakat diajak memanfaatkan lahan pekarangan sebagai kolam budidaya lele. Tujuannya bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi ikan keluarga secara mandiri, tetapi juga membuka peluang usaha yang mampu menambah pendapatan rumah tangga.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. Karena itu, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sarana produksi, tetapi juga pendampingan berkelanjutan agar usaha budidaya mampu berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

DKP Jawa Timur memberikan pembinaan teknis kepada para

pembudidaya, memperkuat kelembagaan kelompok, serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana budidaya.

Pendekatan tersebut dirancang agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai, mampu mengelola usaha secara lebih profesional, sekaligus membangun kemandirian ekonomi melalui sektor perikanan. Manfaat program itu dirasakan langsung oleh para penerima. Salah satunya Subianto, pembudidaya ikan lele asal Desa Wiroborang, Kabupaten Probolinggo.

Melihat besarnya potensi budidaya lele di daerahnya, Subianto menginisiasi pembentukan kelompok pembudidaya ikan agar dapat mengikuti Program KOLEGA. Menurutnya, keberadaan kelompok dengan sistem pengelolaan yang lebih tertata memberikan perubahan signifikan terhadap perkembangan usaha para anggotanya.

Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan membuat kemampuan teknis budidaya meningkat. Produktivitas ikan lele bertambah, kualitas pengelolaan kolam semakin baik, dan hasil panen menjadi lebih optimal. Dampaknya, pendapatan anggota kelompok ikut meningkat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.

Bagi Subianto, manfaat KOLEGA tidak berhenti pada peningkatan pendapatan. Program tersebut juga memperluas pengetahuan masyarakat mengenai teknik budidaya yang baik, memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui peningkatan konsumsi ikan, sekaligus mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan usaha budidaya secara mandiri.

Cerita serupa datang dari Muhammad Amin, salah satu penerima manfaat Program KOLEGA Tahun 2025.

Sebelum mengikuti program tersebut, Amin bekerja sebagai mekanik bengkel. Kini, budidaya ikan lele menjadi sumber penghasilan tambahan yang membantu menopang perekonomian keluarganya.

Tidak puas hanya menjual hasil panen dalam bentuk segar, Amin mulai merancang pengembangan usaha melalui pengolahan hasil budidaya. Ia berencana memproduksi abon lele sebagai produk olahan bernilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan harga jual sekaligus membuka peluang usaha baru.

Ke depan, Amin berharap usaha tersebut tidak hanya berkembang sebagai bisnis keluarga, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat sekitar melalui kegiatan produksi maupun pemasaran produk olahan ikan.

Kisah Subianto dan Amin menjadi gambaran bagaimana KOLEGA mampu menciptakan dampak ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat.

Keberhasilan program juga tercermin dari tingkat keberlanjutannya. Hingga saat ini, dari total 527 keluarga penerima manfaat, sebanyak 395 keluarga atau sekitar 75 persen masih aktif menjalankan usaha budidaya ikan lele yang dikembangkan melalui Program KOLEGA.

Angka tersebut menunjukkan bahwa KOLEGA tidak berhenti sebagai program bantuan jangka pendek. Sebaliknya, program ini berhasil menumbuhkan

kemandirian masyarakat dalam mengelola usaha budidaya ikan secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan produksi ikan. Para penerima manfaat memperoleh pengetahuan baru mengenai teknik budidaya, manajemen usaha, hingga pengembangan produk.

Sebagian di antaranya bahkan mulai melakukan diversifikasi usaha melalui pengolahan hasil panen sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas peluang pasar.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, pembinaan, serta penguatan kapasitas mampu menciptakan manfaat yang berjangka panjang.

Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

Melalui inovasi KOLEGA, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya membangun sektor perikanan budidaya yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga di berbagai daerah di Jawa Timur.

KOLEGA membuktikan bahwa inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat, disertai pendampingan yang konsisten, mampu menghadirkan perubahan nyata. Dari pekarangan rumah yang sebelumnya kurang produktif, tumbuh sumber pangan, peluang usaha, serta harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. (adv)

137 KEPALA DAPUR MBG DICOPOT

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pencopotan kepala SPPG merupakan bagian dari kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan negara. "Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia," kata Sudaryono dalam keterangan, Senin (3/8/2026).

Menurut dia, kepala SPPG akan

langsung dicopot apabila terjadi insiden keracunan sambil menunggu hasil investigasi. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan pangan dalam Program MBG.

"Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend.

Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain.

Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya," ujar Sudaryono.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan semata-mata bersifat menghukum, melainkan membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan penerima manfaat.

"Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta

balita," katanya.

Dari total 137 kepala SPPG yang dicopot, 49 berasal dari Jawa Barat, 26 Lampung, 11 Jawa Timur, 10 Sumatera Utara, 10 Banten, dan lima Jawa Tengah. Salah satu kepala SPPG yang diberhentikan merupakan penanggung jawab dapur MBG di SMKN 6 Semarang, yang menjadi lokasi dugaan keracunan massal terhadap ratusan siswa. (gus,rls dtc/dya)

PENUMPANG KMP MUTIARA: LOMPAT ATAU TERBAKAR

Api yang melalap KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi, Sumenep, Jawa Timur, tak hanya menyisakan korban jiwa. Para penyintas juga membawa cerita tentang kepanikan, perjuangan bertahan hidup selama berjam-jam di tengah laut, hingga aksi seorang ayah yang nekat melompat sambil menggendong balitanya demi menyelamatkan sang buah hati.

Sebanyak 11 korban selamat kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Primary Health Care (RS PHC) Surabaya. Mereka tiba sejak Senin (3/8/2026) dini hari, terdiri atas sembilan laki-laki dewasa, satu perempuan dewasa, dan seorang balita berusia dua tahun. Satu pasien telah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan.

Direktur RS PHC Surabaya, dr. Rony Kurniawan, mengatakan mayoritas korban mengalami cedera akibat terpaksa melompat dari kapal yang terbakar.

"Itu kan besi semua sehingga panas, mereka enggak ada pilihan selain loncat. Dan loncat itu kebanyakan cederanya nyeri-nyeri otot, baik otot kaki, otot punggung, ada yang otot dada juga," kata Rony kepada wartawan di RS PHC Surabaya, Senin.

Menurutnya, benturan keras saat tubuh menghantam permukaan laut menjadi penyebab utama cedera yang dialami para korban.

"Memang mereka pakai pelampung, tapi bagaimanapun karena ketinggian itu kan menyebabkan ada benturan dengan air," ujarnya.

Berenang hingga Tiga Jam

Kesaksian para pasien menunjukkan perjuangan mereka belum berakhir setelah berhasil meninggalkan kapal yang terbakar. Mereka masih harus berenang selama dua hingga tiga jam untuk mencapai kapal-kapal yang datang memberikan pertolongan.

Jarak antara KMP Mutiara Sentosa 2 dengan kapal penyelamat diperkirakan mencapai sekitar dua kilometer.

"Jadi kalau ceritanya pasien, sekitar 2 atau 3 jam mereka harus



berenang menuju ke kapal. Karena ada sekitar 2 km jarak antara kapal yang terbakar dengan kapal sekeliling," tutur Rony.

Berjam-jam berada di laut membuat sebagian besar korban mengalami dehidrasi, kelelahan,

hingga gangguan akibat terlalu banyak menelan air laut.

"Jadi kebanyakan yang masuk dengan muntah-muntah, nyeri perut, vertigo, pusing, badan lemas, dan seterusnya. Ada juga yang memar otot, sedikit lecet semacam luka bakar, tapi

lecet mungkin kena besi yang panas atau apa begitu," jelasnya.

Di balik penyelamatan dramatis itu, muncul kesaksian yang menyoroti minimnya peringatan darurat di atas kapal.

Pasangan suami istri Ari Hidayat (47) dan Denik Rohana (31), penyintas yang mengangkut tujuh ekor kuda menuju Makassar, mengaku baru mengetahui adanya kebakaran setelah mendengar teriakan awak kapal.

"Awal kejadian itu, saya bangun tidur, ternyata sudah ada asap di bawah," kata Denik di Posko Darurat Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Saat asap semakin pekat, Denik meminta suaminya memeriksa dek kendaraan.

"Terus saya lihat ini api, apa asap semakin besar kan. Terus suami saya, saya suruh cek, 'coba dilihat barangkali ada kebakaran atau apa di bawah.' Dicek ternyata sudah terbakar satu mobil," ujarnya.

Menurut Denik, api diduga berasal dari sebuah truk, meski ia tidak mengetahui muatan kendaraan tersebut.

Ari menceritakan, ketika api membesar seluruh penumpang diarahkan menjauh dari titik kebakaran.(pra,ant,rls/dya)

DPR Desak

Audit Total Kapal Penumpang

TRAGEDI kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura, memicu desakan agar pemerintah membenahi sistem keselamatan transportasi laut. Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri Roba meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal penumpang, terutama kapal yang mengangkut penumpang sekaligus kendaraan logistik

Menurut Irine, evaluasi tidak boleh berhenti pada investigasi penyebab kebakaran, tetapi harus mencakup seluruh armada kapal penumpang jarak jauh agar insiden serupa tidak terulang.

"Ke depannya, seperti yang sering saya sampaikan bersama rekan

anggota Komisi V DPR RI, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib melakukan audit keselamatan total terhadap seluruh armada kapal penumpang jarak jauh, khususnya kapal yang mengangkut kombinasi penumpang dan kendaraan logistik," ujar Irine kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Ia juga meminta otoritas pelabuhan, khususnya KSOP di Pelabuhan Tanjung Perak, memperkuat proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Menurutnya, kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan dan proteksi kebakaran tidak boleh diizinkan beroperasi.

"Hal lainnya adalah Otoritas pelabuhan (KSOP) di titik keberangkatan seperti Pelabuhan Tanjung Perak harus memperkuat proses clearance sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Jangan sampai ada toleransi terhadap kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan

KORBAN MENINGGAL KM MUTIARA SENTOSA 2

Total korban teridentifikasi: 5 orang

- Sri Indratmo Wijaya (47) – Pati, Jateng
- Siti Fatimah (57) – Makassar, Sulsel
- Sari Sukoco (39) – Tulungagung, Jatim
- Rino Eka Putra (48) – Agam, Sumbar
- Yedi Hendrawan (63) – Kapuas, Kalteng



proteksi kebakaran," katanya.

Irine menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Ia meminta investigasi yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi bersama Polda Jawa Timur mengusut seluruh aspek yang berkaitan dengan kebakaran.

"Investigasi harus menasar ke berbagai aspek, mulai dari kronologi sistem kelistrikan/mesin kapal, pemenuhan manifes, hingga ketersediaan serta fungsi alat keselamatan seperti sekoci dan life jacket yang sempat menjadi sorotan kepanikan penumpang di lapangan," ujarnya.(pra,ist/dya)



Temuan di Kota Batu: 50% Lebih Stunting Baru dari Bayi Lahir Sehat



Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja. (foto: Dinkes Kota Batu)

BATU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mengungkapkan lebih dari 50 persen kasus stunting baru di daerahnya justru berasal dari bayi yang lahir dalam kondisi sehat dan normal. Temuan tersebut menjadi perhatian karena selama ini stunting lebih sering dikaitkan dengan bayi yang lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu anggapan sebagian orang tua bahwa bayi yang lahir sehat tidak lagi memiliki risiko mengalami gangguan pertumbuhan. Akibatnya, pemantauan tumbuh kembang anak melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, maupun pembacaan grafik pertumbuhan di posyandu tidak dilakukan secara optimal.

"Temuan tersebut merupakan hasil analisis situasi terbaru yang dilakukan teman-teman Dinkes terhadap tipologi kasus stunting di Kota Batu. Berdasarkan hasil analisis itu, bayi yang lahir sehat saat ini justru mendominasi kasus stunting baru," ujar Kepala Dinkes Kota Batu, Aditya Prasaja, Senin (3/8/2026).

"Karena merasa bayinya lahir normal, sehat, orang tua terlena, tidak lagi cermat memantau grafik pertumbuhan bulanan anak. Sampai kemudian tiba-tiba nanti ada perlambatan tumbuh kembang dan jatuh ke status stunting," paparnya.

Aditya menjelaskan, perlambatan pertumbuhan sebenarnya dapat dideteksi sejak dini apabila orang tua rutin memantau grafik pertumbuhan anak setiap bulan. Dengan begitu, intervensi berupa perbaikan asupan gizi maupun konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat segera dilakukan sebelum anak masuk kategori stunting.

Karena itu, pihaknya mengaku telah meminta kader posyandu tidak hanya melakukan penimbangan dan pengukuran balita, tetapi juga lebih aktif mengedukasi orang tua agar mampu membaca grafik tumbuh kembang anak secara mandiri.

Edukasi tersebut, katanya, juga diharapkan melibatkan peran ayah sehingga keputusan penanganan dapat dipahami bersama dalam

keluarga.

"Ketika sudah bisa baca grafik tumbuh kembang anak, orang tua bisa paham tumbuh kembang anak. Kalau bisa, bapaknya juga diajak. Jadi biar tidak kaget dan marah-marah kalau nanti tiba-tiba ada vonis stunting. Jadi prosesnya sama-sama tahu," katanya.

Selain bayi yang lahir sehat, Dinkes Kota Batu juga mengidentifikasi tipologi kasus stunting yang berasal dari bayi dengan riwayat Premature Berat Lahir Rendah (PBLR), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), maupun kombinasi PBLR dan BBLR. Kelompok tersebut tetap menjadi sasaran prioritas karena memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan.

Saat ini, disebutkannya, prevalensi stunting di Kota Batu tercatat sebesar 12,28 persen. Kasus terbanyak masih terkonsentrasi di Desa Oro-oro Ombo. Meski sejumlah balita berhasil keluar dari status stunting, jumlahnya masih berbanding seimbang dengan kemunculan kasus baru..(Santi/Dya)

Buntut Kelangkaan Sapi Hidup, Harga Daging di Pasar Klojen Sentuh Rp160 Ribu/Kg

MALANG - Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang terus mengalami kenaikan dan kini menembus Rp160 ribu per kilogram. Para pedagang menyebut lonjakan harga dipicu mahal dan langkanya pasokan sapi hidup.

Kenaikan harga tersebut salah satunya terjadi di Pasar Klojen, Kota Malang. Salah seorang pedagang daging sapi, Umi Kulsum, mengatakan harga daging sapi kualitas baik saat ini mencapai Rp160 ribu per kilogram. Sementara daging yang umum digunakan untuk olahan seperti rawon dijual Rp150 ribu per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga mulai terjadi sekitar tiga pekan terakhir. Sebelumnya, daging kualitas premium masih dijual Rp150 ribu per kilogram, namun kini naik Rp10 ribu. "Sudah tiga mingguan ini naik jadi Rp160 ribu. Biasanya yang bagus itu Rp150 ribu," ujarnya, Senin (3/8/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu sulitnya mendapatkan sapi hidup. Kondisi tersebut membuat para jagal harus berebut pasokan sehingga harga beli sapi ikut meningkat. "Enggak ada sapi hidup, sapinya

mahal. Yang mencari juga rebutan. Kebetulan saya memasok dari adik sendiri yang jagal sapi," katanya.

Umi menuturkan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya harga daging berangsur turun setelah Hari Raya Idulfitri, tahun ini justru mengalami kenaikan secara bertahap.

"Baru tahun ini naik tiga kali setelah Lebaran. Menjelang Lebaran naik, beberapa hari sebelum Lebaran naik lagi, habis itu merangkak naik terus. Biasanya setelah Lebaran kan turun," ungkapnya.

Akibat harga yang semakin tinggi, minat beli masyarakat ikut menurun. "Berpengaruh ke pembeli. Orang jadi enggak mau beli karena kemahalan," imbuhnya.

Disinggung terkait harapannya kepada pemerintah, Umi menilai pemerintah sebaiknya tidak menambah impor daging beku karena justru berpotensi menekan harga daging sapi lokal. "Lebih baik yang didatangkan sapi hidupnya," tegasnya.

Hal senada disampaikan pedagang daging sapi lainnya di Pasar Klojen, Dewi (nama samaran). Ia mengatakan harga daging sapi kualitas premium

juga telah mencapai Rp160 ribu per kilogram dan mulai naik sejak sekitar 13 Juli 2026.

Menurutnya, kenaikan harga sudah berlangsung beberapa kali sejak bulan Ramadan. "Mulai bulan puasa naik empat kali. Rp5 ribu, Rp5 ribu, Rp10 ribu, lalu Rp10 ribu lagi," katanya.

Dewi juga menyebut harga daging sangat bergantung pada harga sapi hidup di tingkat pemasok. Ketika pasokan sapi terbatas, harga otomatis ikut melonjak.

Kondisi tersebut juga membuat pembelian daging oleh masyarakat menurun, terutama untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. "Jelas berpengaruh ke pembeli. Orang yang biasanya beli eceran untuk konsumsi sehari-hari jadi jarang karena terlalu mahal," katanya. Dewi juga menilai solusi yang lebih tepat adalah mendatangkan sapi hidup dibanding memperbanyak impor daging beku.

Menanggapi keluhan para pedagang,



Ilustrasi: Pembeli daging sapi di salah satu lapak penjual di Pasar Klojen, Kota Malang, Senin (3/8/2026). (Santi/Lentera)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengaku akan lebih dulu mengecek kondisi di lapangan sekaligus menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Nanti kami cek. Kami juga menunggu rilis BPS, setelah itu akan kami lihat apakah memang betul di lapangan seperti itu," katanya.

Wahyu menyebut Pemerintah Kota Malang memiliki peluang melakukan intervensi apabila kenaikan harga tersebut terbukti berdampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat..(Santi/Dya)

Api Tak Terkendali di Washington 600 BANGUNAN LUTES, 60 RIBU JIWA DIEVAKUASI

Enam ratus bangunan ludes, sekitar 60 ribu warga dievakuasi, dan kobaran api masih belum berhasil dijinakkan. Kebakaran hutan yang mengepung Spokane, Washington, menjadi potret terbaru amukan si jago merah yang semakin ekstrem di belahan bumi utara. Di saat yang sama, api juga melahap sekitar 434 ribu hektare lahan di Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai rangkaian bencana tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan kini bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan dampak yang semakin dapat diprediksi dari krisis iklim yang diperparah oleh aktivitas manusia.

Kobaran api yang menjalar di Spokane, negara bagian Washington, memperlihatkan bagaimana musim kebakaran hutan di Amerika Serikat semakin sulit diprediksi sekaligus lebih destruktif. Dalam beberapa hari, ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah, ratusan bangunan musnah, dan aktivitas ekonomi lumpuh.

Otoritas di Spokane menetapkan evakuasi besar-besaran setelah tiga titik kebakaran berkembang cepat di tengah cuaca panas, kelembapan rendah, dan angin kencang. Sekitar 60.000 penduduk diminta meninggalkan kawasan berisiko, sementara sedikitnya 600 bangunan, mulai dari rumah tinggal hingga tempat usaha, dilaporkan rusak atau hancur akibat jilatan api.

Hingga Senin (3/8/2026), petugas pemadam kebakaran masih berupaya membatasi penyebaran api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Spokane, Tom Williams, mengatakan situasi di lapangan masih jauh dari aman.

"Kebakaran ini belum berhasil dikendalikan," kata Williams. Ia menambahkan, tiga titik api masih mengancam kawasan yang berada di bawah perintah evakuasi sehingga operasi pemadaman terus difokuskan untuk melindungi permukiman warga.

Selain menghanguskan ribuan hektare lahan, kebakaran menyebabkan jaringan listrik di sejumlah kawasan dipadamkan sebagai langkah antisipasi agar tidak memicu titik api baru. CEO Avista Utilities, Heather Rosentrader, mengatakan sekitar 10.000 pelanggan sempat kehilangan pasokan listrik.

"Pemadaman dilakukan sebagai langkah keselamatan. Aliran listrik akan dipulihkan setelah kondisi dinilai aman," ujar Rosentrader dalam pernyataannya.

Meski belum ada laporan korban jiwa, ribuan warga harus tinggal di lokasi pengungsian sambil menunggu kepastian kapan kondisi dinyatakan aman. Ketidakpastian itu juga membayangi ribuan keluarga yang belum mengetahui apakah rumah mereka masih berdiri atau telah menjadi abu.

Wali Kota Spokane, Lisa Brown, menggambarkan situasi tersebut sebagai bencana yang belum pernah dialami kotanya.

"Ini adalah bencana alam paling buruk yang pernah dihadapi wilayah kami," kata Brown. Menurutnya, pemerintah kota kini memusatkan perhatian pada keselamatan warga, penyediaan tempat penampungan, serta percepatan pemulihan setelah api berhasil dipadamkan.

Peristiwa di Spokane bukan berdiri sendiri. Washington sedang menghadapi musim kebakaran yang jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2026, lebih dari seribu kebakaran hutan dilaporkan terjadi di negara bagian tersebut dengan luas area terdampak mencapai ratusan ribu hektare. Belasan kebakaran besar masih aktif dan sebagian belum berhasil dikendalikan.

Komisaris Lahan Publik Washington, Dave Upthegrove, menilai kondisi tersebut mencerminkan perubahan pola kebakaran yang semakin ekstrem.

"Ini bukan musim yang normal," ujar Upthegrove, merujuk pada kombinasi cuaca panas, kekeringan, dan angin yang membuat api lebih cepat menyebar.

Kondisi itu mendorong Badan Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem untuk wilayah timur Washington dan sebagian Oregon. Kombinasi suhu tinggi, udara kering, serta angin kencang membuat api dapat menyebar hanya dalam hitungan menit.

Sementara itu, Gubernur Washington Bob Ferguson mengatakan pemerintah negara bagian telah berkoordinasi dengan pemerintah federal untuk mempercepat penanganan bencana.

"Presiden menyampaikan dukungannya atas apa yang dialami orang-orang di sini," kata Ferguson setelah berbicara dengan Presiden Donald Trump.

Apa yang terjadi di Washington hanyalah satu bagian dari musim

INSIDEN KEBAKARAN LAIN DI AS SELAMA 2026

○ Kebakaran Gudang Medline (Tracy, California):

Terjadi pada 11 Juni 2026, melanda gudang seluas satu juta kaki persegi yang merupakan fasilitas distribusi alat kesehatan, terkendala masalah tekanan air dan sistem pemadam.

○ Kebakaran Kilang Minyak (Oklahoma):

Terjadi insiden kebakaran hebat di kilang minyak wilayah Oklahoma pada April 2026.

○ Kebakaran Gudang Centennial Mills (Portland, Oregon):

Kebakaran besar melanda bangunan bersejarah/bekas gudang di kawasan Pearl District pada awal Agustus 2026.



kebakaran global yang tengah berlangsung. Di berbagai kawasan Eropa, api juga meluas sepanjang musim panas.

Data UNECE menunjukkan sekitar 434 ribu hektare lahan telah terbakar di Eropa tahun ini. Prancis kehilangan sekitar 42 ribu hektare hutan pinus di Gironde, sementara Spanyol mencatat lebih dari 200 ribu hektare lahan hangus—dua kali lipat rata-rata historisnya. Di Amerika Serikat dan Kanada, luas area yang terbakar telah melampaui 5,6 juta hektare.

Direktur Divisi Lingkungan dan Hutan UNECE, Paola Deda, mengatakan kebakaran hutan kini tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata.

"Setiap musim panas mengingatkan kita bahwa kebakaran hutan bukan lagi peristiwa luar biasa, tetapi konsekuensi yang semakin dapat diprediksi dari iklim yang memanaskan," ujar Deda, dikutip dari UN News. (gus,ist,voi/dya)





Breakout Tak Kunjung Hilang? Bisa Jadi 7 Kebiasaan Sepele Ini Jadi Picunya

Sudah rutin memakai skincare, rajin mencuci wajah, bahkan mencoba berbagai produk untuk mengatasi jerawat, tetapi kulit masih saja breakout? Penyebabnya belum tentu terletak pada produk yang digunakan. Dalam banyak kasus, kebiasaan sehari-hari justru menjadi faktor yang kerap luput dari perhatian.

Dermatolog menyebut jerawat merupakan kondisi yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hormon, genetika, produksi minyak berlebih, hingga peradangan. Namun, sejumlah kebiasaan sehari-hari juga dapat memperburuk kondisi kulit karena meningkatkan iritasi, menyumbat pori-pori, atau memperbanyak paparan bakteri.

Laporan dari American Academy of Dermatology (AAD) menyebutkan bahwa perawatan kulit yang terlalu agresif maupun kebiasaan menyentuh wajah dengan benda yang tidak bersih dapat memperparah jerawat. Karena itu, memperbaiki rutinitas harian sering kali menjadi langkah awal yang sama pentingnya dengan penggunaan obat atau skincare.

Terlalu Semangat Menggosok Wajah

Banyak orang mengira wajah harus digosok kuat agar terasa benar-benar bersih. Padahal, anggapan itu justru keliru.

Menggosok wajah terlalu keras dapat merusak lapisan pelindung kulit (skin barrier), memicu iritasi, meningkatkan peradangan, hingga memperparah jerawat yang sudah ada.

Alih-alih menggunakan scrub kasar setiap hari, ahli kulit menyarankan membersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut

dengan gerakan memijat menggunakan ujung jari selama sekitar satu menit, kemudian membilasnya dengan air hangat. Eksfoliasi pun sebaiknya dilakukan secukupnya sesuai kondisi kulit, bukan setiap hari.

Jarang Mengganti Sarung Bantal

Sarung bantal menjadi tempat berkumpulnya minyak wajah, keringat, debu, sel kulit mati, hingga sisa produk rambut. Saat tidur selama berjam-jam, seluruh kotoran tersebut terus bersentuhan dengan kulit wajah. Akibatnya, pori-pori lebih mudah tersumbat sehingga risiko munculnya jerawat meningkat. Dermatolog umumnya menyarankan mengganti sarung bantal setidaknya satu hingga dua kali dalam seminggu, terutama bagi pemilik kulit berminyak atau mudah berjerawat.

Brush Makeup Tak Pernah Dicuci

Brush, sponge, maupun beauty blender menyimpan sisa foundation, minyak, bakteri, dan sel kulit mati setelah digunakan.

Jika terus dipakai tanpa dibersihkan, alat-alat tersebut akan memindahkan kembali kotoran ke permukaan kulit.

Membersihkan alat makeup secara rutin menggunakan sabun khusus atau sampo lembut dapat membantu mengurangi risiko penyumbatan pori sekaligus menjaga hasil riasan tetap maksimal.

Layar Ponsel Kotor

Ponsel menjadi benda yang hampir tak pernah lepas dari genggaman. Permukaannya berkali-kali disentuh

tangan, diletakkan di berbagai tempat, bahkan tidak sedikit yang membawanya ke kamar mandi.

Ketika ponsel ditempelkan ke pipi saat menelepon, berbagai bakteri dan kotoran dapat berpindah ke kulit.

Membersihkan layar ponsel secara berkala menggunakan cairan berbasis alkohol yang aman untuk perangkat elektronik serta memanfaatkan earphone atau mode speaker dapat membantu mengurangi kontak langsung dengan wajah.

Tidak Membilas hingga Bersih

Membersihkan wajah belum tentu efektif bila sisa sabun atau facial cleanser masih tertinggal.

Residu produk yang menempel dapat bercampur dengan minyak alami kulit dan berpotensi menyumbat pori-pori. Karena itu, pastikan seluruh busa dan sisa pembersih benar-benar hilang sebelum mengeringkan wajah menggunakan handuk bersih.

Tidur Masih Memakai Makeup

Rasa lelah setelah beraktivitas sering membuat seseorang langsung tertidur tanpa membersihkan wajah.

Padaahal, tidur dengan makeup masih menempel membuat campuran kosmetik, minyak, debu, dan polusi bertahan di permukaan kulit selama berjam-jam.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko pori-pori tersumbat, iritasi, hingga munculnya jerawat baru.

Dermatolog menekankan bahwa membersihkan makeup merupakan langkah dasar dalam menjaga kesehatan kulit, bahkan ketika tidak menggunakan rangkaian skincare yang panjang.

Stres yang Tak Pernah Dikelola

Hubungan antara stres dan jerawat telah lama menjadi perhatian para peneliti.

Saat seseorang mengalami stres, tubuh menghasilkan lebih banyak hormon kortisol. Hormon ini dapat merangsang produksi sebum atau minyak berlebih sekaligus meningkatkan proses peradangan, dua kondisi yang berkaitan erat dengan munculnya jerawat.

Karena itu, menjaga kesehatan mental menjadi bagian penting dari perawatan kulit. Tidur cukup, rutin berolahraga, meditasi, hingga menyediakan waktu untuk relaksasi dapat membantu mengendalikan stres sekaligus menjaga kondisi kulit. (far,ist/dya)

Beauty Tips: Rutinitas Anti-Breakout

1. Cuci wajah maksimal dua kali sehari dengan pembersih lembut.
2. Gunakan pelembap non-comedogenic meski kulit berminyak.
3. Jangan memencet jerawat karena meningkatkan risiko bekas luka.
4. Gunakan tabir surya setiap pagi.
5. Hindari mencoba terlalu banyak produk baru dalam waktu bersamaan agar kulit tidak mudah iritasi.

Selalu Jadi Sasaran Nyamuk? Ternyata Bukan karena 'Darah Manis'



Pernah merasa menjadi satu-satunya orang yang pulang dengan tubuh penuh bentol setelah berkumpul di luar ruangan? Sementara orang lain di sekitar tampak baik-baik saja. Banyak yang mengaitkannya dengan mitos "darah manis", padahal penelitian menunjukkan penyebabnya jauh lebih kompleks.

Menurut para ahli entomologi, nyamuk tidak memilih mangsa berdasarkan rasa darah. Serangga pengisap darah ini justru mengandalkan kombinasi sinyal biologis yang dipancarkan tubuh manusia, mulai dari karbon dioksida (CO₂), suhu tubuh, hingga aroma kulit yang dipengaruhi mikrobioma.

"Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia karena mereka membutuhkan protein dari darah untuk perkembangan telurnya," tulis BBC dalam laporan yang merangkum

berbagai hasil penelitian terbaru.

Edus Sasaran dari Jarak 10 Meter

Sebelum mendarat di kulit, nyamuk sebenarnya sudah mendeteksi keberadaan manusia dari kejauhan. Peneliti menjelaskan, nyamuk menggunakan kombinasi penglihatan dan penciuman untuk menemukan target pada jarak hingga sekitar 10 meter. Salah satu sinyal terkuat adalah karbon dioksida yang dikeluarkan setiap kali manusia bernapas.

Semakin banyak CO₂ yang dilepaskan seseorang, semakin mudah pula nyamuk menemukannya.

Karena itu, orang dewasa umumnya lebih sering menjadi sasaran dibanding anak-anak. Begitu pula perempuan hamil yang

menghasilkan lebih banyak karbon dioksida akibat meningkatnya aktivitas metabolisme selama kehamilan. Fenomena inilah yang juga dimanfaatkan dalam berbagai perangkap nyamuk modern yang menggunakan karbon dioksida sebagai umpan.

Tubuh Hangat Lebih Menggoda

Selain karbon dioksida, suhu tubuh juga menjadi penanda penting. Nyamuk cenderung lebih tertarik pada tubuh yang hangat dan lembap. Itulah sebabnya seseorang yang baru selesai berolahraga sering kali menjadi sasaran empuk.

Aktivitas fisik meningkatkan produksi panas tubuh, mempercepat pernapasan, serta memicu keluarnya keringat. Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan sinyal yang sangat mudah dikenali nyamuk.

Menurut Profesor Steve Lindsay dari Durham University, perempuan hamil memiliki daya tarik sekitar dua kali lebih besar dibanding perempuan yang tidak hamil karena menghasilkan lebih banyak panas tubuh dan karbon dioksida.

Orang dengan ukuran tubuh lebih besar juga umumnya menghasilkan panas dan CO₂ lebih banyak sehingga berpotensi lebih menarik bagi nyamuk.

Aroma Kulit

Mitos bahwa nyamuk menyukai orang yang memiliki "darah manis" telah lama dibantah para ilmuwan.

Yang sebenarnya menarik perhatian nyamuk adalah aroma khas kulit manusia.

Kulit manusia dihuni jutaan mikroorganisme yang membentuk mikrobioma. Mikroba ini memecah berbagai senyawa di permukaan kulit menjadi volatile organic compounds (VOCs) atau senyawa organik yang mudah menguap. Senyawa inilah yang menghasilkan aroma tubuh unik pada setiap orang.

Para peneliti memperkirakan terdapat lebih dari 500 jenis VOC pada kulit manusia. Nyamuk mampu membedakan kombinasi aroma tersebut dan menggunakan informasi itu untuk memilih target. Salah satu kelompok senyawa yang paling menarik perhatian nyamuk adalah asam karboksilat.

Penelitian yang dilakukan Rockefeller University terhadap 64 responden menemukan orang dengan kadar asam karboksilat lebih tinggi pada kulitnya bisa memiliki tingkat daya tarik terhadap nyamuk hingga 100 kali lebih besar dibanding individu lain.

Faktor Genetik Ikut Berperan

Tidak hanya aroma kulit, faktor keturunan juga diyakini memengaruhi seberapa menarik seseorang bagi nyamuk. Penelitian terhadap anak kembar menunjukkan bahwa pasangan kembar identik memiliki tingkat daya tarik terhadap nyamuk yang hampir sama, sedangkan kembar tidak identik menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Temuan itu mengindikasikan adanya pengaruh genetik terhadap aroma tubuh maupun respons biologis yang membuat seseorang lebih sering menjadi target gigitan. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Bandana Simbol Gaya Bersejarah Jadi Andalan Fesyen Lagi



Bandana kembali mencuri perhatian di dunia mode. Aksesori berbentuk kain persegi yang sempat identik dengan gaya bohemian dan streetwear kini tampil sebagai salah satu item paling fleksibel dalam berbagai koleksi fesyen.

Mulai dari dipakai sebagai penutup kepala, syal leher, gelang tangan, hingga penghias tas, bandana kembali hadir sebagai pelengkap gaya yang melintasi tren dan generasi.

Rumah mode seperti Versace, Gucci, Dior, hingga Saint Laurent beberapa tahun terakhir kembali menghadirkan bandana dalam koleksi mereka. Sementara itu, media mode

internasional seperti Vogue mencatat bandana menjadi salah satu aksesori yang terus berulang dalam tren musim panas karena mudah dipadukan dengan berbagai gaya, dari minimalis hingga vintage.

Di Indonesia, bandana juga kembali populer melalui tren "Y2K fashion" dan gaya kasual yang banyak diadopsi kreator konten di media sosial. Sejumlah stylist menilai popularitas bandana didorong oleh karakteristiknya yang sederhana, terjangkau, sekaligus mampu mengubah tampilan secara instan.

Namun, di balik fungsinya sebagai aksesori, bandana memiliki perjalanan sejarah yang jauh lebih panjang.

Berasal dari India

Sejarawan tekstil menyebut bandana berasal dari India. Istilah "bandana" diyakini berasal dari kata bandhani, teknik pewarnaan ikat tradisional yang telah dipraktikkan selama berabad-abad di wilayah Gujarat dan Rajasthan. Ada pula yang mengaitkannya dengan kata Sanskerta badhnati yang berarti "mengikat".

Pada abad ke-18, kain bermotif tersebut mulai diperdagangkan ke Eropa melalui jalur dagang yang melibatkan VOC dan English East India

Company. Awalnya bandana digunakan sebagai sapu tangan, tetapi motifnya yang ramai membuat noda tidak mudah terlihat sehingga semakin digemari masyarakat Eropa.

Seiring waktu, bandana berkembang menjadi aksesori fesyen. Motif paisley yang terinspirasi dari Persia menjadi salah satu corak paling ikonis dan hingga kini masih banyak diproduksi berbagai merek.

Simbol Status hingga Alat Kampanye

Memasuki abad ke-19, produksi bandana meluas ke berbagai negara Eropa. Warna merah khas yang kemudian dikenal sebagai "Turkey Red" menjadi identitas baru bandana dan masih menjadi warna yang paling melekat hingga sekarang.

Di Amerika Serikat, bandana memperoleh makna politik. Pada masa Revolusi Amerika, produsen tekstil John Hewson membuat bandana bergambar George Washington sebagai bagian dari penyebaran semangat kemerdekaan. Tradisi itu berlanjut pada abad berikutnya ketika berbagai kandidat presiden menggunakan bandana sebagai media kampanye dan promosi.

Menurut sejumlah arsip sejarah Amerika, bandana kemudian menjadi media iklan yang murah sekaligus efektif pada awal abad ke-20 karena mudah diproduksi dan digunakan masyarakat.

Makna bandana berubah lagi ketika digunakan para penambang batu bara dalam aksi besar di West Virginia pada 1921. Ribuan buruh mengenakan bandana merah saat memperjuangkan hak-hak pekerja. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah gerakan buruh Amerika.

Pada Perang Dunia II, bandana kembali memperoleh makna baru. Perempuan yang bekerja di pabrik dan galangan kapal mengenakan bandana

untuk mengikat rambut selama bekerja. Sosok Rosie the Riveter, karakter propaganda perang Amerika yang mengenakan bandana merah bermotif polkadot, kemudian menjadi ikon perempuan pekerja dan simbol emansipasi yang masih dikenang hingga kini.

Peran bandana sebagai simbol sosial tidak berhenti di masa perang. Pada 2017, media mode *The Business of Fashion* bersama sejumlah desainer meluncurkan kampanye #TiedTogether.

Melalui gerakan tersebut, pelaku industri fesyen diajak mengenakan bandana putih sebagai lambang solidaritas, keberagaman, dan persatuan di tengah meningkatnya polarisasi politik di Amerika Serikat.

BoF menyebut inisiatif tersebut bukan sekadar kampanye fesyen, melainkan ajakan agar industri mode ikut menyuarakan nilai inklusivitas tanpa memandang ras, agama, gender, maupun orientasi seksual.

Kisah Bandana Merah

Bandana juga dikenang melalui kisah Welles Crowther, korban serangan 11 September 2001 di World Trade Center.

Seperti dilaporkan *The New York Times*, Crowther membantu puluhan orang keluar dari gedung yang terbakar sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Para penyintas hanya mengingat seorang pria yang menutupi wajahnya dengan bandana merah.

Belakangan diketahui bahwa pria tersebut adalah Crowther, yang sejak kecil memang selalu membawa bandana merah pemberian ayahnya.

Kisahnyapun kemudian diangkat dalam film dokumenter *Man in the Red Bandana* dan menginspirasi berbagai kegiatan amal serta lomba lari tahunan di Boston College. (far,ist/dya)



Beratnya Berobat di ...dari Hal 1

Urusan kesehatan di Indonesia sedang menghadapi persimpangan yang amat krusial. Di satu sisi, jaring pengaman kesehatan publik--BPJS Kesehatan--kembali membunyikan alarm darurat akibat pendarahan kas yang terus berulang. Di sisi lain, warga yang memilih jalur mandiri atau menggunakan asuransi swasta justru dihadapkan pada kenyataan pahit yaitu tagihan rumah sakit dan biaya berobat yang melompat tanpa kendali.

Soal defisit anggaran, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, "Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," terangnya dalam paparan Kerjasama Strategis Program JKN di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Melambungnya tarif perawatan medis di fasilitas kesehatan secara tidak langsung menghantam benteng keuangan BPJS Kesehatan di hilir. Berdasarkan data operasional per 3 Agustus 2026, rasio klaim (claim ratio) BPJS Kesehatan telah merangkak ke angka 108,72 persen,

melampaui batas aman finansial di angka 100 persen.

Artinya, dari setiap iuran Rp100 yang masuk dari masyarakat, BPJS harus merogoh kas sebesar Rp108,72 demi membayar klaim rumah sakit.

Prihati Pujowaskito tak menampik bahwa kondisi ini mengulang pola krisis lama yang sempat membayangi lembaga jaminan sosial tersebut.

"Jadi Bapak, Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," beber Prihati.

Sebab utama dari ketimpangan ini bersumber dari mampatnya penerimaan iuran peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU). Prihati mengonfirmasi ada sedikitnya 54 juta peserta yang kini berstatus non-aktif gara-gara menunggaki iuran.

Perilaku kepesertaan yang pasif--yakni baru membayar iuran ketika diserang penyakit parah dan kembali menunggu begitu selesai pengobatan--menjadi penyebab utama tersendatnya arus kas bulanan. Akibatnya, pendarahan finansial sebesar Rp2 triliun saban bulan tak bisa dihindari.

Tarif KRIS & Janji Dana Talangan

Di tengah himpitan defisit kas dan tekanan inflasi medis, pemerintah juga dihadapkan pada dilema penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mengamanatkan penghapusan skema Kelas 1, 2, dan 3 sesuai Perpres Nomor 59 Tahun 2024.

Aturan KRIS mewajibkan fasilitas kamar rawat inap rumah sakit diseragamkan menjadi maksimal 4 tempat tidur per kamar. Di satu sisi, langkah ini bermaksud meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi di sisi lain mereduksi jumlah total tempat tidur (bed) di banyak rumah sakit--sesuatu yang berisiko memperpanjang daftar antrean pasien berobat.

Di samping itu, formula tarif iuran tunggal pengganti Kelas 1, 2, dan 3 belum juga ditetapkan secara resmi hingga pertengahan 2026. Pemerintah kini berada di posisi simalakama. Jika menaikkan besaran iuran demi menambal defisit bakal makin membebani masyarakat yang terhimpit inflasi, namun membiarkannya tetap sama akan mempercepat habisnya cadangan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Guna mencegah risiko stagnasi pembayaran klaim medis ke rumah sakit, BPJS Kesehatan kini bergantung pada wacana suntikan dana segar APBN sebesar Rp20 triliun. Sayangnya, hingga awal Agustus 2026 ini, anggaran talangan tersebut masih belum bisa dicairkan lantaran masih tertahan hambatan birokrasi dan

penyelesaian harmonisasi regulasi Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan Presiden pelaksana.

Prihati menggarisbawahi bahwa kekuatan cadangan kas saat ini hanya cukup untuk menjaga keteraturan pembayaran klaim hingga awal tahun depan.

"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi dukungan," ujar Prihati menutup keterangannya di Jakarta.

Inflasi Medis 17,8 Persen

Laporan Health Trends 2026 terbitan Mercer Marsh Benefits mencatat estimasi inflasi medis di Indonesia bakal menyentuh angka 17,8 persen pada 2026. Angka ini tidak hanya meroket jauh di atas inflasi umum nasional yang berada di kisaran 2,5 persen, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi teratas dalam lonjakan biaya berobat di wilayah Asia.

Dampaknya merembet ke seluruh komponen pengobatan--mulai dari jasa konsultasi dokter spesialis, tes laboratorium, biaya obat-obatan, tindakan pembedahan, hingga persewaan kamar rawat inap.

"Kenaikan biaya berobat berpotensi menggerus tabungan keluarga, mengganggu rencana keuangan, serta memperbesar kebutuhan terhadap perlindungan kesehatan yang memadai," tutur Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Emira E. Oepangat, di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Emira menggarisbawahi bahwa ketidakpastian geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi pemicu utama di balik tingginya inflasi medis tersebut. Industri kesehatan domestik hingga kini masih memikul ketergantungan besar pada impor bahan baku obat, farmasi, serta perangkat medis berteknologi tinggi.

Begitu rupiah melemah, biaya pengadaan barang medis di rumah sakit membengkak otomatis. Pada akhirnya, penyesuaian tarif tersebut dibebankan kembali kepada pasien umum maupun perusahaan asuransi.

AAJI mencatat total klaim kesehatan yang mesti dibayarkan industri asuransi jiwa sepanjang 2025 saja sudah menembus Rp26,8 triliun atau tumbuh 9,2 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan nilai klaim yang melaju lebih cepat dari penerimaan premi ini mendongkrak loss ratio perusahaan asuransi, yang berujung pada penyesuaian harga polis asuransi kesehatan swasta di pasaran.

Persoalan biaya berobat ini kian pelik akibat masalah tata kelola. Data BPJS Kesehatan dalam Indonesia Anti-Fraud Forum menyebutkan bahwa praktik Fraud, Waste, and Abuse (FWA) atau kecurangan dan

pemborosan medis berkontribusi hingga 5 persen terhadap total rasio klaim industri kesehatan.

"Kenaikan biaya kesehatan akibat inflasi medis adalah realita yang dihadapi oleh seluruh ekosistem layanan kesehatan. Prioritas kami adalah memastikan nasabah tetap dapat memperoleh akses terhadap perawatan medis dengan rasa tenang," jelas Chief Health Officer Prudential Indonesia, Yosie William Iroth. Yosie menambahkan bahwa langkah efisiensi, transparansi biaya dengan jaringan rumah sakit, serta pemanfaatan data analitik terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan perlindungan polis nasabah.

Syarat Akses Layanan Publik

BPJS Kesehatan akan mengkaji kemungkinan menjadikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif sebagai syarat dalam berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, hingga keberangkatan haji dan umrah. Wacana itu juga dipertimbangkan untuk diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kepatuhan peserta sekaligus menjaga keberlanjutan Program JKN.

"Kalau orang mengurus SIM, kita akan bermohon supaya kepolisian (menyarankan) BPJS-nya aktif. Kemudian berangkat haji dan umrah, BPJS-nya aktif. Kemudian kalau mau masuk kuliah seharusnya BPJS-nya aktif, sehingga Pak Rektor juga lebih tenang kalau mahasiswanya ada apa-apa ada penjaminan," kata Pujo di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, cakupan persyaratan tersebut masih akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan juga menjadi syarat dalam pengurusan paspor maupun pembelian tiket pesawat.

"Kemudian pengurusan paspor dan kalau perlu membeli tiket pesawat, BPJS-nya aktif. Ini adalah langkah-langkah ke depan untuk kita carikan solusi dan kolaborasinya dengan kementerian dan lembaga lain," ujarnya.

Pujo mengungkapkan, usulan tersebut dilatarbelakangi masih tingginya jumlah peserta JKN yang tidak aktif akibat tunggakan iuran. Dari total lebih dari 285 juta peserta atau sekitar 98,8 persen penduduk Indonesia yang telah terdaftar, sebanyak 54 juta jiwa tercatat tidak aktif.

"Peserta saat ini sudah 285 juta jiwa lebih. Tetapi, ini di angka 98,8 persen, masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa sampai hari ini kami sering laporkan," ucapnya. (wid,ist,dtc,kcm/dya)

Data Operasional BPJS Kesehatan



Perbandingan Keuangan Per Bulan



MAJELIS HAKIM DITETAPKAN, SIDANG YAQUT DIMULAI 11 AGUSTUS

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 11 Agustus 2026. Bersamaan dengan itu, majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut juga telah ditetapkan, menandai dimulainya proses pembuktian di pengadilan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan sidang perdana akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani dengan hakim anggota Adek Nurhadi dan Sigit Herman Binaji.

Yaqut tidak duduk sendiri di kursi terdakwa. Tiga terdakwa lain yang akan menjalani persidangan pada hari yang sama ialah mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba.

Perkara ini bermula dari dugaan pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 yang dinilai tidak sesuai ketentuan. KPK menduga praktik tersebut disertai pemberian uang kepada penyelenggara negara agar kuota



Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji, Yaqut Cholil Qoumas, kembali menjalani penahanan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/3/2026). (ANTARA)

tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dialokasikan kepada pihak tertentu.

Dalam konstruksi perkara KPK, Ismail Adham diduga menyerahkan 30.000 dolar Amerika Serikat kepada Gus Alex. Selain itu, Ismail juga diduga memberikan 5.000 dolar AS dan

16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah saat itu, Hilman Latief.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan 406.000 dolar AS kepada Gus Alex terkait pengaturan kuota haji khusus tambahan. Atas

Dewas KPK Proses Aduan Pengalihan Penahanan

DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan dugaan pelanggaran etik terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih dalam proses pemeriksaan. Aduan tersebut berkaitan dengan keputusan KPK yang sempat mengalihkan penahanan Yaqut dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah pada Maret 2026.

Ketua Dewas KPK Gusrizal mengatakan pihaknya belum mengambil kesimpulan atas laporan tersebut karena proses pemeriksaan masih berjalan.

"Kami sedang dalam proses terhadap kasus tersebut, apakah terbukti atau tidak terbukti," kata Gusrizal di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Selain mengungkap perkembangan aduan itu, Dewas juga memaparkan kinerja penanganan dugaan pelanggaran etik sepanjang 2026. Anggota Dewas KPK Sumpeno

menyebut hingga 31 Juli 2026 pihaknya menerima 14 pengaduan dugaan pelanggaran etik. Dewas juga masih menangani satu laporan yang diterima pada 2025, sehingga total terdapat 15 perkara yang diproses.

Dari jumlah tersebut, delapan laporan masih berada pada tahap analisis, lima lainnya memasuki tahap klarifikasi, sedangkan dua kasus telah bergulir ke sidang etik.

"Terdapat dua sidang etik dan satu di antaranya merupakan pengaduan pada 2025. Jadi, pengaduan yang satu sidang etik ini diterima oleh dewan pengawas pada 2025, tetapi disidangkan pada 2026," ujar Sumpeno.

Ia menambahkan, Dewas telah menjatuhkan sanksi kepada dua pegawai KPK, masing-masing berupa hukuman berat dan hukuman sedang.

"Mudah-mudahan di akhir 2026 ini, pelanggaran-pelanggaran etik tidak banyak dilakukan oleh insan KPK. Mudah-mudahan ya," katanya.

Laporan terhadap KPK mencuat setelah Yaqut yang berstatus tahanan KPK dialihkan menjadi tahanan

rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Keputusan itu memicu pertanyaan publik mengenai dasar hukum dan pertimbangan etik yang digunakan penyidik.

Pada 1 April 2026, Dewas KPK mengonfirmasi telah menerima dan menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat yang mempertanyakan kebijakan tersebut. Lima hari kemudian, tepatnya 24 Maret 2026, Yaqut kembali ditempatkan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia 2023–2024 mulai disidik KPK pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Penyidikan kemudian berkembang setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit pada 24 Februari 2026 yang menyebut potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622 miliar. (tin,ist/dya)

TIMELINE KASUS YAQUT CHOLIL QOUMAS

9 Jan 2026

KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.

11 Mar 2026

Praperadilan ditolak, status tersangka dinyatakan sah.

12 Mar 2026

Yaqut diperiksa dan ditahan di Rutan KPK.

19 Mar 2026

Penahanan dialihkan menjadi tahanan rumah.

24 Mar 2026

KPK mengembalikan Yaqut ke Rutan KPK.

1 Jun 2026

Pelimpahan berkas ditunda hingga operasional haji 2026 selesai.

10 Jun 2026

Masa penahanan diperpanjang 30 hari.

3 Agu 2026

Berkas dinyatakan P-21 dan dilimpahkan ke penuntutan. Yaqut tetap ditahan menunggu sidang.

pemberian tersebut, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan Asrul Latief merupakan representasi Yaqut dalam penerimaan uang tersebut. Lembaga antirasuah juga menilai praktik itu tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi berdampak pada ribuan calon jemaah haji reguler yang harus menunda keberangkatan karena distribusi kuota tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

KPK menyebut Gus Alex dan Hilman Latief merupakan representasi Yaqut dalam penerimaan uang tersebut. Lembaga antirasuah juga menilai praktik itu tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi berdampak pada ribuan calon jemaah haji reguler yang harus menunda keberangkatan karena distribusi kuota tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Menjelang persidangan, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menyatakan menghormati pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek hukum yang perlu diuji selama persidangan. (wid ukm,thor/dya)